

Vol. 20, No. 3 (Juli-September 2025)

ISSN 1978-3868

GITA SANG SURYA

Media Diskursus Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan

Pemerintahan Sekuler di Era Pasca Sekularisme:
Akankah Bertahan? ... 2

Kesetaraan, Keadilan, dan Kapabilitas:
Membangun Fondasi Politik Inklusif dalam Masyarakat Multikultural Indonesia
Berdasarkan Pemikiran Filosofis Martha Nussbaum ... 23

Tegangan Dialektis Agama dan Ruang Publik dalam Masyarakat Majemuk:
Sebuah Elaborasi dan Kontekstualisasi Gagasan Armando Salvatore ... 34

Relevansi Teori Keadilan Demokrasi Global untuk Kebijakan Publik Pendidikan
dari Perspektif Filsafat Politik Pendidikan ... 41

Menghidupkan Kembali Pendidikan Klasik untuk Kesadaran Lingkungan
dan Keberlanjutan di Era Digital ... 48

Relasi Antarmanusia Menurut Emmanuel Levinas ... 62

Kritik Terhadap Ateisme Feuerbach dan Marx ... 65

Garis Besar Teologi Harapan ... 67

Apa Itu Neraka?

Memaknai Gambaran Injil Tentang Neraka ... 72

Keadilan Hukum dan Martabat sebagai Imago Dei:
Telaah Teologis-Ontologis atas Pemikiran Thomas Aquinas
dan Implikasinya terhadap Reformasi Hukum Indonesia ... 75

Ordo Amoris sebagai Prinsip Etika, Spiritualitas, dan Ontologi Moral:
Suatu Sintesis Augustinian, Fenomenologis, dan Skolastik ... 85



MADAH PERSAUDARAAN SEMESTA

JPIC OFM INDONESIA

JPIC OFM Indonesia atau Franciscans Office for Justice, Peace, and Integrity of Creation Ordo Fratrum Minorum merupakan bagian integral dari pelayanan persaudaraan Fransiskan di Indonesia yang berkarya dalam bidang keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Dengan mengikuti mandat Injili dan spiritualitas St. Fransiskus Assisi, JPIC OFM Indonesia berusaha mengupayakan suatu cara hidup dan karya yang menjawab tantangan zaman, kepedulian dan pembelaan bagi yang miskin dan tertindas. Kegiatan JPIC OFM Indonesia mencakup enam bidang, yaitu animasi, advokasi, litbang, sosial-karitatif, ekologi, dan ekopastoral.

JPIC OFM Indonesia terlibat dalam kegiatan ekopastoral (pengembangan pertanian organik) di Flores, Rumah Singgah St. Antonius Padua bagi kaum miskin dan gelandangan di Jakarta, pemberdayaan sosial-ekonomi bagi masyarakat korban bencana alam, animasi kaum muda dan kaum religius dalam bidang JPIC, penerbitan buku dan Gita Sang Surya, penyadaran HAM, pengelolaan sampah di Jakarta, dan seminar terkait isu keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Sejak 2007, JPIC OFM Indonesia terlibat dalam advokasi untuk masyarakat korban tambang di Nusa Tenggara Timur.

Untuk mewujudkan misi tersebut, JPIC OFM Indonesia bekerja sama dengan berbagai lembaga semisi dalam lingkup Gereja Katolik maupun umum (LSM dan lembaga kajian), baik di tingkat lokal dan nasional. Dalam lingkup keluarga Fransiskan, JPIC OFM Indonesia berafiliasi dengan JPIC OFM General di Roma dan Franciscans International (NGO keluarga Fransiskan yang bersifat konsultatif di PBB) yang berkantor di New York dan Genewa.

Bantuan dan dukungan bagi kegiatan JPIC OFM dapat disalurkan ke:

Bank BCA, Nomor Rekening: 6340700510
Atas nama Ordo Saudara-Saudara Dina qq JPIC OFM

Sekretariat JPIC OFM Indonesia:

Jl. Letjend. Soeprapto, No. 80 Galur, RT.7/RW.4, Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10540

Telp/Faks: (021) 42803546

Email: jpicofm_indonesia@yahoo.com.au

- INFORMASI -

- Mulai 2023 Gita Sang Surya terbit empat kali dalam setahun (Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember).
- Gita Sang Surya hanya memuat artikel dan tinjauan buku.
- Dalam setiap edisi, tidak ada tema khusus seperti terbitan Gita Sang Surya sebelumnya. Sehingga Gita Sang Surya tiga bulanan ini berisikan artikel dan tinjauan buku yang membahas tema umum terkait diskursus keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan.
- Berbagai macam rubrik seperti sosok, berita, cerpen, puisi, karikatur, dll tidak lagi dimuat di Gita Sang Surya. Rubrik tersebut dimuat dan dapat diakses di website JPIC OFM Indonesia.

“Jika sudah menerima *Gita Sang Surya*, harap konfirmasi ke nomor WA 0819-0410-1226”

GITA SANG SURYA

Media Diskursus Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan

Diterbitkan oleh JPIC OFM Provinsi St.
Michael Malaikat Agung Indonesia.

Penanggung Jawab: Ketua Komisi JPIC OFM Indonesia. **Pemimpin Redaksi:** Yansianus Fridus Derong OFM. **Redaktur Pelaksana:** Yohanes Wahyu Prasetyo OFM. **Redaksi:** Antonius Nugroho Bimo Prakoso OFM, Yohanes Kristoforus Tara OFM, dan Valens Dulmin. **Bendahara:** Mikael Gabra Santrio OFM. **Sirkulasi:** Arief Rahman. **Editor dan Lay Out:** Yohanes Wahyu Prasetyo OFM.

Alamat Redaksi: JPIC OFM Indonesia, Jln. Letjend. Soeprapto, No. 80 Galur, RT.7/RW.4, Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10540.
HP (WA): 081904101226. **Email:** gss_jpicofm@yahoo.com. **Website:** www.jpicofmindonesia.org.

Redaksi menerima artikel yang membahas tema keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Tulisan dikirim melalui email dan akan diolah tanpa mengabaikan isi sebagaimana dimaksudkan penulis.

- DAFTAR ISI -

Pemerintahan Sekuler di Era Pasca Sekularisme:

Akankah Bertahan? ... 2

- Dr. Narwastuyati Petronela Mbeo -

Kesetaraan, Keadilan, dan Kapabilitas: Membangun Fondasi Politik Inklusif dalam Masyarakat Multikultural Indonesia Berdasarkan Pemikiran Filosofis Martha

Nussbaum ... 23

- Dr. Cicilia Damayanti -

Tegangan Dialektis Agama dan Ruang Publik dalam Masyarakat Majemuk: Sebuah Elaborasi dan Kontekstualisasi Gagasan Armando Salvatore ... 34

- Agustinus Tamtama Putra -

Relevansi Teori Keadilan Demokrasi Global untuk Kebijakan Publik Pendidikan dari Perspektif Filsafat Politik Pendidikan ... 41

- Dr. V. Mbula Darmin OFM -

Menghidupkan Kembali Pendidikan Klasik untuk Kesadaran Lingkungan dan Keberlanjutan di Era Digital ... 48

- Dr. Cicilia Damayanti -

Relasi Antarmanusia Menurut Emmanuel Levinas ... 62

- Yohanes Wahyu Prasetyo OFM -

Kritik Terhadap Ateisme Feuerbach dan Marx ... 65

- Yohanes Wahyu Prasetyo OFM -

Garis Besar Teologi Harapan ... 67

- Dr. Andreas Bernadinus Atawolo OFM -

Apa Itu Neraka?

Memaknai Gambaran Injil Tentang Neraka ... 72

- Dr. Andreas Bernadinus Atawolo OFM -

Keadilan Hukum dan Martabat sebagai *Imago Dei*: Telaah Teologis-Ontologis atas Pemikiran Thomas Aquinas dan Implikasinya terhadap Reformasi Hukum Indonesia ... 75

- Prof. Adv. Raymond R. Tjandrawinata, MAST, PhD -

Ordo Amoris sebagai Prinsip Etika, Spiritualitas, dan Ontologi Moral: Suatu Sintesis Augustinian, Fenomenologis, dan Skolastik ... 85

- Prof. Adv. Raymond R. Tjandrawinata, MAST, PhD -



- MADAH PERSAUDARAAN SEMESTA -

KESETARAAN, KEADILAN, DAN KAPABILITAS: MEMBANGUN FONDASI POLITIK INKLUSIF DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL INDONESIA BERDASARKAN PEMIKIRAN FILOSOFIS MARTHA NUSSBAUM

- Dr. Cicilia Damayanti -

(Alumna Doktor Filsafat STF Driyarkara Jakarta)

Politik adalah salah satu aspek yang tak terhindarkan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini mencerminkan cara negara atau masyarakat mengatur diri mereka sendiri dan mengambil keputusan bersama yang akan memengaruhi nasib bersama. Menurut Martha Nussbaum, seorang filsuf dari Amerika yang menjabat sebagai profesor di Universitas Chicago, politik harus berakar pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kapabilitas dari masing-masing pribadi (Nussbaum, 2010, pp. 82-83). Nussbaum telah menjadi salah satu tokoh terkemuka dalam filsafat politik kontemporer, dengan karyanya yang mendalam dan relevan.

Beberapa karya Nussbaum antara lain *Political Emotions* (2013), yang mengkaji hubungan antara emosi dan politik, memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi oleh masyarakat multikultural dalam menjalankan sistem demokrasi. Kemudian dia juga menulis *The Monarchy of Fear: A Philosopher Looks at Our Political Crisis* (2018) yang mengeksplorasi ketegangan politik dan sosial yang ada di dunia saat itu dan memberikan pemikiran tentang bagaimana kita dapat meresponsnya secara etis.

Artikel ini akan menjelajahi konsep-konsep politik yang mendasari pemikiran Nussbaum dan menghubungkannya dengan situasi politik di Indonesia. Nussbaum memegang keyakinan kuat bahwa politik yang baik harus didasarkan pada prinsip keadilan yang merata, kesetaraan yang tidak dapat dikompromikan, dan pengembangan kapabilitas pribadi (Nussbaum, 2011a, pp. 18-20).

Pertanyaan-pertanyaan filosofis yang mendalam muncul seiring dengan eksplorasi konsep-konsep ini. Bagaimana kita dapat

merumuskan makna sejati dari keadilan? Apakah kesetaraan bersifat absolut atau tergantung pada konteks? Bagaimana kita dapat mengukur kapabilitas pribadi dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas pengembangan kapabilitas mereka?

Selain itu, artikel ini akan membahas tentang signifikansi pendidikan politik dalam membentuk masyarakat yang adil, yang sejalan dengan pemikiran Nussbaum. Pendidikan politik menjadi elemen kunci dalam proses pembentukan masyarakat yang lebih sadar akan hak-hak pribadi dan prinsip-prinsip demokrasi.

Artikel ini juga akan mengeksplorasi pemikiran Nussbaum secara lebih mendalam. Menganalisis konsep-konsepnya yang memengaruhi politik. Kemudian mencari cara untuk mengaplikasikannya dalam konteks Indonesia yang memiliki dinamika politiknya sendiri. Melalui pemahaman ini, kita berharap dapat memberikan pandangan yang lebih jelas tentang bagaimana prinsip-prinsip filosofis dapat membantu mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan demokratis di Indonesia.

POLITIK SEBAGAI CERMIN KEADILAN, KESETARAAN, DAN KAPABILITAS

Martha Nussbaum menghadirkan pandangan yang mendalam tentang politik sebagai cermin bagi prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kapabilitas pribadi. Konsep sentralnya tentang kapabilitas (*capability*) adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh pribadi agar dapat mencapai kehidupan yang layak (Nussbaum, 2001, pp. 12-13). Konsep ini mencakup seperangkat keterampilan, kapabilitas, dan kesempatan yang melebihi sekadar hak-hak formal atau kebebasan formal.

Kapabilitas, menurut Nussbaum, adalah alat untuk mewujudkan kebebasan nyata pribadi (Nussbaum, 2011a, p. 18).

Pengertian kapabilitas di sini tidak hanya berkaitan dengan hak-hak yang dijamin oleh undang-undang atau peraturan formal, melainkan juga mencakup kemampuan praktis yang memungkinkan seseorang untuk menjalani kehidupan bermakna dan meraih potensi penuhnya sebagai manusia. Kapabilitas menciptakan landasan yang memungkinkan pribadi untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat, mengambil keputusan, dan mencapai berbagai tujuan pribadi dan sosial (Alexander, 2008, pp. 20-25).

Konsep kapabilitas Nussbaum juga menekankan pentingnya kesetaraan akses terhadap kapabilitas ini. Baginya, penting bahwa semua pribadi, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi mereka, memiliki akses yang setara terutama dalam hal pendidikan yang layak dan fasilitas kesehatan yang merata (Nussbaum, 2011b, pp. 19-20; Nussbaum, 2009, 2011). Dalam konteks politik, hal ini mengharuskan pemerintah dan masyarakat untuk bekerja bersama-sama untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap pribadi untuk mengembangkan dirinya.

Menurutnya, politik seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas pribadi. Namun, kapabilitas yang dimaksud olehnya jauh lebih dari sekadar hak-hak formal. Kapabilitas adalah seperangkat kapabilitas yang mendasar, yang harus dimiliki oleh pribadi agar dapat mencapai kehidupan yang layak (Nussbaum, 2011a, pp. 19-20; Nussbaum, 2011).

Dalam esensinya, kapabilitas menciptakan landasan nyata untuk kebebasan pribadi, melebihi sekadar kebebasan formal di atas kertas. Berikut merupakan kesepuluh kategori kapabilitas yang penting dalam pandangan Nussbaum, dan mencakup aspek-aspek vital dalam kehidupan pribadi (Nussbaum, 2011a, pp. 33-34, 2013a, 2022): (1) Hidup yang Sehat: kesempatan untuk akses ke layanan kesehatan

berkualitas, sanitasi yang memadai, air bersih, dan nutrisi yang mencukupi. (2) Keterampilan Intelektual: kemampuan dan akses untuk belajar dan mengembangkan keterampilan intelektual melalui pendidikan berkualitas, literasi, dan akses ke pengetahuan. (3) Kemampuan Berbicara dan Berpikir Kritis: dalam hal ini mencakup kemampuan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi, berdebat, dan berpikir kritis tentang isu-isu yang memengaruhi kehidupan. (4) Mengembangkan Kemampuan Emosional: setiap orang diharapkan dapat mengenali dan mengelola emosi, serta berinteraksi secara sehat dengan orang lain. (5) Menjalani Relasi dengan Sesama: kemampuan untuk membentuk hubungan sosial yang mendukung, mencakup kasih sayang, persahabatan, dan dukungan sosial.

(6) Kesempatan Memilih dan Memengaruhi: setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik, seperti hak memilih dan memengaruhi kebijakan. (7) Mendapatkan Kesempatan untuk Bekerja: setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan yang memberikan penghasilan yang mencukupi. (8) Kemampuan Bergerak dan Beraktivitas: setiap orang memiliki kesempatan untuk bergerak bebas, bermain, dan berpartisipasi dalam kegiatan fisik yang sehat. (9) Kesempatan Hidup dengan Martabat: hak yang adil dan perlakuan yang layak, serta perlindungan hukum yang setara. (10) Kesempatan untuk Memiliki Rasa Kebanggaan dan Harga Diri: setiap orang diberikan hak untuk memiliki rasa harga diri positif dan bangga dengan identitas dan budaya sendiri.

Kesepuluh kategori kapabilitas ini saling terkait dan saling mendukung. Mencapai kapabilitas dalam satu kategori seringkali memungkinkan perkembangan kapabilitas dalam kategori lainnya (Nussbaum, 2011a, p. 18; Nussbaum, 2011). Dalam konteks Indonesia yang kompleks, pemahaman ini dapat membantu membentuk dasar untuk kebijakan politik yang lebih inklusif dan berkeadilan (Jesica, 2023).

Mendalami konsep politik Martha Nussbaum mengundang kita untuk merenungkan makna sejati dari keadilan. Keadilan adalah salah satu prinsip mendasar dalam politik, tetapi seringkali pemahaman tentang keadilan bisa sangat bervariasi. Bagaimana kita dapat merumuskan makna sejati dari keadilan?

Keadilan, dalam konteks pemikiran Nussbaum tidak hanya sebatas pemberian hak-hak formal kepada pribadi. Keadilan juga mencakup aspek kapabilitas pribadi untuk mencapai kehidupan yang layak (Nussbaum, 2009, p. 40). Bagi Nussbaum, suatu masyarakat yang adil bukan hanya menjamin hak-hak formal, tetapi juga menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap pribadi untuk mengembangkan potensi penuh mereka. Keadilan adalah tentang memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang setara untuk mencapai kapabilitas mereka (Nussbaum, 2001, 2011a, 2019, pp. 30-35).

Kemudian, apakah kesetaraan bersifat absolut atau tergantung pada konteks. Konsep kesetaraan dalam politik adalah hal yang sangat penting, tetapi bagaimana kita harus memahami kesetaraan? Nussbaum mengajukan argumen bahwa kesetaraan tidak harus diartikan sebagai perlakuan yang sama bagi semua pribadi. Sebaliknya, kesetaraan harus dipahami sebagai upaya untuk menghapus ketidaksetaraan yang tidak adil dalam akses terhadap kapabilitas (Nussbaum, 2002, 2011a, p. 40). Dalam konteks Indonesia yang beragam, pemahaman ini mengharuskan kita untuk mempertimbangkan berbagai latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda. Kesetaraan di sini bukanlah tentang penegasan absolut, melainkan tentang penciptaan kondisi yang setara bagi semua pribadi untuk mengembangkan kapabilitas mereka sesuai dengan potensi masing-masing (Dewi, 2022; Hilal, 2019; Yasa1 et al., 2021).

Pertanyaan yang tidak kalah pentingnya adalah siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas pengembangan kapabilitas pribadi. Pemahaman Nussbaum menekankan bahwa

tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan perkembangan kapabilitas pribadi adalah tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, dan pribadi itu sendiri (Nussbaum, 2009, 2011). Dalam konteks Indonesia, pemerintah memiliki peran kunci dalam menyediakan akses dan kesempatan yang setara, sementara masyarakat dan pribadi memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan kesadaran akan hak-hak dan kapabilitas ini, serta berpartisipasi dalam proses politik untuk menciptakan perubahan positif (Baghi, 2015; Ramadhani et al., 2023).

Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep-konsep ini, kita akan memahami bagaimana politik menjadi sarana untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kapabilitas dalam konteks Indonesia yang beragam. Eksplorasi selanjutnya adalah tentang prinsip-prinsip mendasar politik, khususnya mengenai keadilan dan kesetaraan, yang menjadi prinsip-prinsip mendasar politik.

KEADILAN DAN KESETARAAN: PRINSIP-PRINSIP MENDASAR POLITIK

Dalam pemikiran politik Martha Nussbaum, prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan merupakan dua pilar utama yang membentuk dasar pemahamannya tentang makna politik itu sendiri. Baginya, politik yang bermakna adalah politik yang menekankan perlindungan hak asasi manusia, memastikan kesetaraan di hadapan hukum, dan mempromosikan perlakuan yang adil bagi semua pribadi (Nussbaum, 2011, p. 25). Namun, ketika kita memasuki wilayah abstrak ini, pertanyaan filosofis akan sangat kompleks dan menggugah pemikiran.

Salah satu pertanyaan mendasar yang terus diperdebatkan dalam filsafat politik: Apakah keadilan bersifat objektif atau subjektif? Pertanyaan ini mengajak kita merenungkan apakah terdapat standar universal yang dapat digunakan untuk menentukan apa yang adil, ataukah konsep keadilan ini bergantung pada pandangan, nilai-nilai, dan konteks pribadi.

Bagi Nussbaum, keadilan bersifat objektif dalam arti bahwa ada beberapa standar fundamental yang berlaku universal, seperti perlindungan hak asasi manusia, yang seharusnya tidak ditentang oleh pandangan atau budaya apa pun (Indrajaya, 2019, p. 110; Nussbaum, 2003, p. 763).

Di Indonesia, upaya untuk mencapai keadilan politik masih menghadapi berbagai tantangan. Kontroversi seputar penerapan hukum yang adil dan perlindungan hak asasi manusia terus menjadi isu yang kompleks (Jesica, 2023; Yasa1 et al., 2021). Dalam kerangka pemikiran Nussbaum, penting bagi kita untuk merenungkan pertanyaan lebih lanjut: Bagaimana kita dapat mencapai konsensus tentang apa yang adil dalam masyarakat yang sangat beragam seperti Indonesia? Di sini, konsep kesetaraan muncul sebagai landasan penting. Kesetaraan di hadapan hukum, di mana semua warga memiliki hak yang sama untuk diperlakukan dengan adil, adalah prinsip yang harus dijunjung tinggi.

Namun, Nussbaum juga menyoroti pentingnya pemahaman multikultural dalam konteks politik. Pemikirannya menjadi relevan terutama di Indonesia, sebuah negara yang kaya akan keragaman budaya dan etnis. Nussbaum berpendapat bahwa penting untuk mengajarkan tentang keragaman sejak dini, sehingga setiap pribadi dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang budaya lain dan melihat nilainya (Deigh, 2004; Nussbaum, 2002, 2013a). Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, pemahaman tentang budaya lain bukan hanya tentang toleransi, tetapi juga tentang membangun hubungan yang lebih baik antarbudaya, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada masyarakat yang lebih harmonis dan adil.

Tidak hanya itu, pemahaman multikultural juga dapat memperkaya perspektif kita dalam politik. Mengapa kita perlu mempelajari setidaknya salah satu budaya dari bangsa lain? Karena melalui pemahaman budaya lain, kita dapat menggali beragam sudut pandang, solusi

kreatif, dan berbagai pendekatan untuk masalah politik. Belajar tentang budaya lain sangat penting dalam konteks globalisasi saat ini, di mana kolaborasi lintas budaya dan pemahaman yang mendalam tentang berbagai konteks politik menjadi semakin penting.

Memahami multikulturalisme memiliki arti yang sangat besar bagi Indonesia. Hal ini dapat memperkuat kerangka politik yang menciptakan kesetaraan, melindungi hak asasi manusia, dan mempromosikan keadilan. Dengan merenungkan prinsip-prinsip mendasar ini, kita dapat mendekati tantangan politik di Indonesia dengan cara yang lebih bijak dan berlandaskan pada nilai-nilai universal yang menentukan masa depan lebih baik bagi semua warga negara, tanpa memandang latar belakang budaya atau etnis mereka.

Nussbaum, sebagai seorang kosmopolitan, memandang politik sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan manusia yang lebih besar, tanpa memandang batas-batas nasional atau perbedaan budaya. Pemahaman kosmopolitanisme dalam konteks pemikiran Nussbaum merupakan hal yang penting bagi Indonesia karena dapat membantu kita menghadapi tantangan politik dalam masyarakat yang semakin terglobalisasi (Nussbaum, 2011a, p. 93).

Asal-usul kata *kosmopolitan* sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua kata: *kosmou* yang berarti dunia, dan *polites* yang berarti warga negara. Dalam pemikiran Nussbaum, kosmopolitanisme adalah pandangan yang menganggap bahwa semua pribadi adalah warga negara dunia, bukan hanya warga negara dari satu negara tertentu (Nussbaum, 2011a, p. 94). Dalam hal ini, semua manusia, tanpa memandang asal-usul mereka, memiliki hak yang sama untuk dihormati, dilindungi, dan diperlakukan secara adil.

Dalam konteks Indonesia yang kaya akan keragaman budaya dan etnis, konsep kosmopolitanisme menjadi semakin penting.

Mengadopsi perspektif kosmopolitan dalam politik berarti mengakui bahwa keadilan dan kesetaraan harus diterapkan secara universal, tanpa memandang etnis, agama, atau budaya. Konsep ini tidak hanya tentang toleransi terhadap perbedaan, tetapi juga merangkul keragaman sebagai sumber kekayaan dan kemajuan.

Pemahaman multikultural dan kosmopolitanisme sangat penting bagi Indonesia. Sebab, dapat membangun fondasi yang kuat untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif. Konsep ini bukan hanya tentang mencapai keadilan politik, tetapi juga tentang memperluas keadilan sosial dan ekonomi kepada semua lapisan masyarakat, terlepas dari latar belakang budaya atau etnis mereka. Hal ini juga memungkinkan Indonesia untuk berperan aktif dalam panggung dunia, berkontribusi dalam mencapai tujuan-tujuan global seperti perdamaian dunia dan pembangunan berkelanjutan (*Mempercepat Pemberantasan Kemiskinan Ekstrem Di Indonesia, 2022*).

Dengan demikian, pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep kosmopolitanisme dalam pemikiran politik Nussbaum dapat membantu Indonesia menavigasi tantangan politik yang semakin kompleks dan terglobalisasi. Kosmopolitanisme dan multikulturalisme merupakan panggilan untuk kita semua, sebagai warga dunia, untuk bersatu dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, berkeadilan, dan harmonis, di mana semua pribadi, dari berbagai budaya dan latar belakang, dapat hidup dengan martabat dan hak-hak yang dihormati.

Dari pemahaman terhadap konsep multikulturalisme, kosmopolitanisme, dan prinsip-prinsip keadilan serta kesetaraan dalam politik, kita dapat mengidentifikasi kerangka yang kokoh untuk memandu perjalanan Indonesia menuju politik yang lebih inklusif. Selanjutnya, kita akan menjelajahi lebih lanjut bagaimana konsep kesetaraan dapat menjadi landasan untuk menciptakan politik yang

memperhitungkan semua warga negara, terlepas dari latar belakang budaya atau etnis mereka. Dengan demikian, kita akan memahami bagaimana Indonesia dapat mengatasi tantangan politiknya dengan pandangan yang lebih luas, mendukung keberagaman, dan mengupayakan keadilan yang lebih besar dalam semua aspek kehidupan masyarakat.

KESETARAAN: MENUJU POLITIK YANG INKLUSIF

Kesetaraan adalah konsep lain yang sering dihubungkan dengan keadilan dalam politik. Kesetaraan yang inklusif, dalam konteks pemikiran Martha Nussbaum, merujuk pada konsep di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan politik dan akses yang adil terhadap sumber daya politik, tanpa memandang latar belakang budaya, etnis, gender, atau status ekonomi mereka (Nussbaum, 2016, p. 68). Kesetaraan merupakan fondasi penting dalam upaya membangun politik yang benar-benar demokratis dan merata. Namun, pertanyaan filosofis yang muncul adalah apakah kesetaraan seperti ini dapat dicapai dalam masyarakat yang sangat beragam seperti Indonesia, ataukah ada faktor-faktor yang membatasi akses ke kesetaraan politik?

Martha Nussbaum, dalam pemikirannya, mengadopsi pandangan John Rawls tentang keadilan sebagai salah satu panduan utama dalam memahami konsep kesetaraan. John Rawls, seperti dikutip oleh Nussbaum, mengemukakan bahwa keadilan sosial dapat dicapai melalui prinsip-prinsip politik yang terbuka agar menjadi *overlapping consensus* atau kesepakatan berdasarkan kesamaan dalam perbedaan. Dalam konsep ini, pribadi dengan berbagai pandangan dan nilai dapat mencapai kesepakatan tentang prinsip-prinsip keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak, terlepas dari perbedaan latar belakang mereka (Nussbaum, 2019, p. 243).

Untuk mencapai kesetaraan yang inklusif, terutama di Indonesia yang multikultural, kita

perlu mengadopsi pendekatan yang holistik. Untuk mencapai tujuan ini bukan hanya tentang masalah hukum, tetapi juga masalah budaya dan sosial yang lebih mendalam. Pertama, kita perlu memastikan bahwa hukum dan peraturan yang mendukung kesetaraan diimplementasikan secara adil dan tidak diskriminatif. Hal ini melibatkan reformasi hukum, perubahan kebijakan, dan penegakan hukum yang kuat (Baghi, 2015; Mulyani, 2023, p. 57; Sudarno, 2022; Yasa1 et al., 2021).

Namun, kesetaraan yang inklusif juga harus dibangun dari bawah ke atas. Dalam hal ini, kesetaraan mencakup pendidikan dan kesadaran publik yang lebih baik tentang hak-hak politik dan fasilitas kesehatan yang memadai bagi setiap warga negara. Kita perlu memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama ke pendidikan politik dan ikut berpartisipasi dalam proses politik. Tindakan ini dapat mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan sosial yang dapat menghambat akses ke kesetaraan politik.

Selain itu, penting untuk mempromosikan dialog antarbudaya yang lebih baik dan menggali keragaman sebagai sumber kekayaan dalam politik. Dialog antarbudaya melibatkan pendekatan kosmopolitan dan multikultural. Kita perlu menghormati berbagai budaya dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat Indonesia, sambil memastikan bahwa semua pribadi memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan politik.

Dalam konteks Indonesia yang multikultural, mencapai kesetaraan politik yang inklusif memerlukan komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat, dan pribadi. Hal ini melibatkan upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan yang ada, mengedukasi masyarakat tentang hak-hak politik, dan merangkul keragaman sebagai aset yang memperkaya politik di Indonesia (Baghi, 2015; Dewi, 2022; Sudarno, 2022). Dengan pendekatan yang holistik ini, kita dapat membangun fondasi politik yang lebih inklusif, di mana setiap warga negara memiliki peran

yang sama dalam menentukan masa depan bangsa.

Selain itu, dalam konteks masyarakat yang sangat beragam seperti Indonesia, penting untuk mengenali bahwa kesetaraan politik juga mencakup pengakuan terhadap hak-hak minoritas dan kelompok yang rentan. Hal ini melibatkan perlindungan terhadap hak-hak etnis, agama, gender, dan kelompok-kelompok yang mungkin memiliki pandangan atau kebutuhan khusus. Sebagai negara yang pluralistik, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kelompok tersebut dapat berpartisipasi dalam politik tanpa hambatan atau diskriminasi.

Dalam upaya mencapai kesetaraan politik yang inklusif, kita juga harus mempertimbangkan pentingnya partisipasi aktif masyarakat sipil. Aktivitas masyarakat sipil, termasuk kelompok advokasi, LSM, dan gerakan sosial, dapat memainkan peran penting dalam mengawasi pemerintah, mempromosikan perubahan kebijakan yang lebih adil, dan memastikan bahwa hak-hak warga negara dilindungi. Indonesia telah melihat banyak contoh di mana peran aktif masyarakat sipil berdampak positif pada politik dan masyarakat (Baghi, 2015; Christmas, 2021).

Dalam menghadapi tantangan politik yang semakin kompleks dan dinamis, pemahaman tentang kesetaraan politik yang inklusif menjadi semakin penting. Inklusifitas merupakan upaya untuk menciptakan politik yang lebih demokratis, adil, dan merata. Di mana suara semua warga negara dihormati dan diakui. Dengan mengadopsi pendekatan holistik yang mencakup reformasi hukum, pendidikan politik, dialog antarbudaya, dan partisipasi aktif masyarakat sipil, Indonesia dapat menuju ke arah politik yang lebih inklusif dan mewujudkan visi Martha Nussbaum tentang masyarakat yang didasarkan pada keadilan, kesetaraan, dan kapabilitas pribadi (Nussbaum, 2011a, pp. 18-20; Sudarno, 2022; Yasa1 et al., 2021). Cita-cita bangsa Indonesia untuk mencapai kesetaraan dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai

pandangan dan nilai yang ada di dalam masyarakatnya untuk mencapai keadilan sosial.

Dari pemahaman terhadap konsep multikulturalisme, kosmopolitanisme, prinsip-prinsip keadilan Martha Nussbaum, dan kesetaraan politik yang inklusif dalam politik, kita dapat mengidentifikasi kerangka yang kokoh untuk memandu perjalanan Indonesia menuju politik yang lebih inklusif. Selanjutnya pendidikan politik sangat penting untuk mengajak setiap warga negara agar memiliki kesadaran politik dalam memahami hak-hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang politik, setiap warga negara dapat lebih efektif berpartisipasi dalam proses politik, mengawasi pemerintah, dan memperjuangkan keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat yang semakin kompleks ini.

PENDIDIKAN POLITIK: MENGEMBANGKAN WARGA NEGARA YANG SADAR POLITIK

Pendidikan politik adalah instrumen krusial dalam mewujudkan politik yang berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kapabilitas. Namun, dalam konteks pemikiran Martha Nussbaum, pertanyaan filosofis yang muncul adalah bagaimana kita dapat mengajarkan masyarakat untuk berpikir kritis tentang politik dan apakah pendidikan politik seharusnya berfokus pada pemahaman sistem politik yang ada atau juga melibatkan pembelajaran nilai-nilai politik yang mendasar?

Martha Nussbaum mengadopsi konsep yang diperkenalkan oleh John Rawls tentang liberalisme politis. Liberalisme politis mengusulkan bahwa kesetaraan politik dapat dicapai melalui prinsip-prinsip politik yang dapat diterima oleh beragam pandangan dan nilai dalam masyarakat. Dalam konteks pendidikan politik, ini berarti mengajarkan warga negara bagaimana berpartisipasi dalam proses politik dengan memahami perbedaan pandangan dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama (Nussbaum, 2011a, pp. 78-91, 2013b, pp. 128-129).

Untuk Indonesia, peningkatan signifikan dalam pendidikan politik sangat mendesak. Kurikulum di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan harus mencakup aspek politik yang lebih mendalam. Pendidikan politik yang efektif harus mengajarkan warga negara bagaimana berpartisipasi aktif dalam proses politik, bagaimana mengenali dan mengatasi ketidaksetaraan politik, serta bagaimana melindungi hak-hak politik mereka. Lembaga-lembaga pendidikan, termasuk sekolah, universitas, dan lembaga pelatihan, perlu berperan aktif dalam memberikan pendidikan politik yang baik. Namun, peran masyarakat juga sangat penting. Semua pribadi, termasuk pemimpin masyarakat, harus memahami pentingnya pendidikan politik dan berkontribusi dalam memastikan bahwa pendidikan politik mencapai semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang mungkin memiliki akses yang terbatas (Baghi, 2015; Becker et al., 2015; Kulas et al., 2023; Rachels, 2021).

Pendidikan politik yang efektif untuk masyarakat Indonesia harus mencakup pemahaman yang mendalam tentang sistem politik, nilai-nilai demokrasi, dan hak-hak politik. Dalam hal ini, pendidikan politik hendaknya dapat mempromosikan pemikiran kritis, etika politik, dan kesadaran akan peran pribadi dalam proses politik. Di samping itu, penting untuk memahami bahwa pendidikan politik tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah. Media, organisasi masyarakat sipil, dan program-program pendidikan informal juga dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran politik (Hameleers, 2021; Morrison et al., 2021).

Setiap warga negara Indonesia saat ini dituntut untuk “melek” politik. Hal ini tidak hanya akan memperkuat demokrasi, tetapi juga akan mengarah pada politik yang lebih berkeadilan dan setara. Setiap orang diajak untuk semakin terlibat dalam pendidikan politik, baik sebagai peserta maupun pendukung, dan untuk memastikan bahwa pendidikan politik mencakup semua lapisan masyarakat. Dengan begitu, kita dapat bersama-sama berkontribusi

pada perkembangan Indonesia yang lebih baik, yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi dan kesejahteraan bagi semua warga negara.

Selain itu, penting untuk diingat bahwa pendidikan politik tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang pemberdayaan pribadi. Pendidikan politik menjadi salah satu cara untuk memberikan keterampilan dan keyakinan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam politik dengan penuh percaya diri. Pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan dalam pendidikan politik juga harus mengatasi ketidaksetaraan akses, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau komunitas yang kurang mendapatkan perhatian (Sudarno, 2022; Yasa1 et al., 2021).

Bagi masyarakat Indonesia, pentingnya pendidikan politik sangat jelas. Dalam masyarakat yang semakin terhubung dan kompleks seperti sekarang, warga negara yang sadar politik adalah aset berharga. Mereka dapat membantu memastikan bahwa suara mereka didengar dalam proses pengambilan keputusan politik, mengawasi pemerintah dengan cermat, dan memperjuangkan hak-hak mereka. Dengan pendidikan politik yang baik, kita dapat menghindari konflik politik yang berkepanjangan dan bergerak menuju masyarakat yang lebih demokratis dan inklusif.

Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk mendukung dan berpartisipasi dalam upaya pendidikan politik. Dukungan kita merupakan tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa pendidikan politik dapat diraih oleh setiap masyarakat Indonesia. Melalui tindakan ini, kita dapat bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih baik, yang didasarkan pada keadilan, kesetaraan, dan partisipasi aktif semua warga negara dalam politik. Dengan cara ini, demokrasi di Indonesia akan terus berkembang dan menciptakan manfaat bagi semua.

Berikut ini adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk memajukan pendidikan politik dengan

memberdayakan warga negara Indonesia agar semakin “melek” politik, sehingga kehidupan demokrasi bagi keadilan yang merata di Indonesia dapat terwujud (Baghi, 2015; Dewi, 2022; Mulyani, 2023; Ramadhani et al., 2023; Yasa1 et al., 2021; Zamrodah, 2016): (1) Reformasi Kurikulum Sekolah: dengan cara membuat perubahan dalam kurikulum sekolah di semua tingkatan pendidikan untuk memasukkan pendidikan politik yang lebih mendalam. Reformasi pendidikan ini mencakup pemahaman tentang sistem politik, nilai-nilai demokrasi, dan hak-hak politik.

(2) Pelatihan Guru: sangat perlu untuk melakukan pelatihan rutin bagi guru agar mereka memiliki pemahaman yang baik tentang pendidikan politik dan dapat mengajar dengan efektif. Guru adalah kunci dalam menyebarkan pengetahuan politik kepada generasi muda. (3) Media Sosial Pendidikan Politik: kita dapat mendorong penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. Kampanye pendidikan politik yang terarah dan terpercaya dapat menjadi sumber pengetahuan yang efektif. (4) Pendidikan Politik di Masyarakat: pemerintah bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait dapat mengadakan program pendidikan politik di tingkat komunitas, seperti kelompok warga, desa, atau kecamatan. Tindakan ini dapat melibatkan diskusi kelompok, lokakarya, dan seminar sederhana tentang isu-isu politik lokal dan nasional.

(5) Mendorong Partisipasi Aktif: dengan cara mengajak warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik, termasuk pemilihan umum, pemungutan suara, dan perdebatan politik. Hal ini dapat membantu mereka menerapkan pengetahuan politik yang telah mereka peroleh. (6) Mengintegrasikan Pendidikan Politik dalam Pendidikan Keagamaan: pemerintah dapat memasukkan pendidikan politik dalam kurikulum pendidikan keagamaan untuk memastikan bahwa nilai-nilai politik yang mendasar seperti toleransi, pluralisme, dan partisipasi ditekankan dalam konteks agama. (7) Kerja Sama Antarlembaga:

hal ini dapat dilakukan dengan mendorong kerja sama antara lembaga-lembaga pendidikan, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam upaya meningkatkan pendidikan politik. Kerja sama lintas sektor dapat menghasilkan sumber daya yang lebih besar dan efek yang lebih besar.

(8) Evaluasi Berkala: seperti melakukan evaluasi berkala terhadap program pendidikan politik untuk memastikan efektivitasnya. Tindakan ini melibatkan pengumpulan umpan balik dari peserta pendidikan politik dan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi tersebut. (9) Kampanye Kesadaran Politik: pemerintah dapat mengadakan kampanye nasional yang menekankan pentingnya kesadaran politik di kalangan masyarakat. Kampanye ini dapat melibatkan selebriti, tokoh masyarakat, dan pemimpin daerah untuk menciptakan dampak yang lebih besar. (10) Pendidikan Politik untuk Kelompok Rentan: pemerintah harus memastikan bahwa pendidikan politik juga mencakup kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan komunitas minoritas. Pendekatan khusus harus digunakan untuk memastikan bahwa pendidikan politik mencapai semua lapisan masyarakat.

Tindakan-tindakan tersebut merupakan langkah-langkah nyata yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan setiap orang, untuk memperkuat pendidikan politik di Indonesia. Dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam upaya ini, kita dapat bersama-sama mencapai visi politik yang didasarkan pada keadilan, kesetaraan, dan partisipasi aktif semua warga negara.

KESIMPULAN

Dalam perjalanan menuju kemajuan sebagai bangsa, Martha Nussbaum telah menghadirkan pandangan berharga tentang politik yang mengutamakan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kapabilitas. Fondasi pemikiran politiknya terletak pada kesepuluh kategori kapabilitas yang menjadi landasan bagi upaya

membangun masyarakat yang lebih baik. Bagi Nussbaum, politik yang memiliki makna adalah politik yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas pribadi untuk mencapai kehidupan layak. Dalam pertanyaan filosofisnya, kita diajak untuk merenung tentang bagaimana menciptakan masyarakat yang adil, setara, dan memiliki kapabilitas.

Indonesia, sebagai bangsa yang kaya akan keragaman dan potensi, memiliki kesempatan besar untuk mencapai kemajuan yang luar biasa. Namun, untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dan meraih kemajuan yang merata, kita harus menerapkan dengan sungguh-sungguh kesepuluh kategori kapabilitas Nussbaum di seluruh negeri. Tindakan ini tidak hanya untuk memastikan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar, tetapi juga melindungi hak asasi manusia dan memperkuat partisipasi politik semua warga negara.

Pendidikan menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi ini. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk segera mereformasi sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan akan memberdayakan warga negara dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik dan ekonomi. Dengan reformasi pendidikan yang kokoh, kita akan menciptakan fondasi yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan dan meraih kemajuan sebagai bangsa yang bersatu dalam beragam potensi yang dimiliki.

Komitmen untuk menciptakan perubahan yang signifikan sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Sekarang adalah momen yang tepat bagi bangsa ini untuk bersatu dalam menjamin pendidikan yang merata dan fasilitas kesehatan memadai yang tersedia di setiap wilayah tanah air, tanpa kecuali. Setiap warga negara Indonesia dituntut untuk melakukan gerakan bersama agar peduli terhadap masa depan bangsa. Gerakan ini menjadi kekuatan untuk

membentuk Indonesia yang adil, setara, dan berbudaya.

Setiap orang dapat menjadi agen perubahan untuk menginspirasi dan merealisasikan cita-cita bagi kemajuan bangsa Indonesia. Indonesia dapat menjadi negara yang berdaulat dengan sistem pendidikan yang berkualitas dan memiliki sarana kesehatan yang memadai. Perubahan terutama dalam sistem pendidikan dan kesehatan merupakan langkah kunci untuk mencapai stabilitas politik. Sehingga cita-cita masyarakat adil makmur merata dapat terwujud di bumi Indonesia.

Dengan persatuan, semangat, dan tindakan nyata, bangsa Indonesia akan mampu membentuk masa depan yang lebih baik. Sehingga menjadikan Indonesia Emas 2045 bukan hanya sebagai impian, melainkan sebagai kenyataan yang diciptakan bersama-sama. Setiap warga negara Indonesia dapat menjadi bagian dari perubahan positif demi tercapainya kehidupan politik Indonesia yang stabil, berlandaskan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. ***

SUMBER BACAAN

Alexander, J. M. (2008). *Capabilities and Social Justice: The Political Philosophy of Amartya Sen and Martha Nussbaum*. Ashgate Pub. Limited.

Baghi, F. (2015). Pendidikan multikultural dan globalisasi: untuk profit atau cultivating humanity? *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, 7 (5), 178-187.

Becker, F. G., Cleary, M., Team, R. M., Holtermann, H., The, D., Agenda, N., Science, P., Sk, S. K., Hinnebusch, R., Hinnebusch A, R., Rabinovich, I., Olmert, Y., Uld, D. Q. G. L. Q., Ri, W. K. H. U., Lq, V., Frxqwu, W. K. H., Zklfk, E., Edvvhg, L. V, Wkh, R. Q. (2015). *What is Government. Syria Studies*, 7(1),37-72.

Christmas, B. (2021). *Property and Justice: A Liberal Theory of Natural Rights*. Taylor & Francis.

Deigh, J. (2004). Nussbaum's account of compassion. *Philosophy and Phenomenological Research*, 68 (2), 465-472.

Dewi, K. H. (2022). *Gender and Politics in Post-Reformasi Indonesia: Women Leaders within Local Oligarchy Networks*. Springer Nature Singapore.

Hameleers, M. (2021). *Populist Disinformation in Fragmented Information Settings: Understanding the Nature and Persuasiveness of Populist and Post-factual Communication*. Taylor & Francis.

Hilal, M. (2019). Filsafat Bahasa Biasa Gilbert Ryle Pendidikan Karakter Di Indonesia. *Jurnal Filsafat*, 29 (2), 206-227.

Indrajaya, F. (2019). From imagination to compassion and democracy: Martha Nussbaum on the role of art. *International Journal of Creative and Arts Studies*, 6 (2), 109-123.

Jesica, R. (2023). Kemendagri: Penanganan Kemiskinan Ekstrem Harus Berbasis Data. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/riv-era-jesica/kemendagri-penanganan-kemiskinan-ekstrem-harus-berbasis-data>

Kulas, P., Waśkiewicz, A., & Krawczyk, S. (2023). *Understanding Recognition: Conceptual and Empirical Studies*. Taylor & Francis.

Mempercepat Pemberantasan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia. (2022). <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/5074/mempercepat-pemberantasan-kemiskinan-ekstrem-di-indonesia?>

Morrison, J., Birks, J., & Berry, M. (2021). *The Routledge Companion to Political Journalism*. Taylor & Francis.

Mulyani, L. (2023). *Traditional Communities in Indonesia: Law, Identity, and Recognition*. Taylor & Francis.

- Nussbaum, M. C. (2001). *Women and Human Development: The Capabilities Approach*. Cambridge University Press.
- Nussbaum, M. C. (2002). Humanities and Human Development. *Journal of Aesthetic Education*, 36 (3), 39-49.
- Nussbaum, M. C. (2003). Compassion & terror. *Daedalus*, 132 (1), 763-769.
- Nussbaum, M. C. (2010). *Not for profit: Why democracy needs the humanities*. Princeton University Press.
- Nussbaum, M. C. (2011a). *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. Harvard University Press.
- Nussbaum, M. C. (2011b). Reinventing the Civil Religion: Comte, Mill, Tagore. *Victorian Studies*, 54 (1), 7-34.
- Nussbaum, M. C. (2013a). *Political emotions: Why love matters for justice*. The Belknap Press of Harvard University Press.
- Nussbaum, M. C. (2013b). *Political Emotions*. Harvard University Press.
- Nussbaum, M. C. (2016). *Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities - Updated Edition*. Princeton University Press.
- Nussbaum, M. C. (2019). *The Cosmopolitan Tradition: A Noble but Flawed Ideal*. Harvard University Press.
- Nussbaum, M. C. (2022). Précis of "Upheavals of Thought." *Philosophy and Phenomenological Research*, 68 (2), 443-449.
- Nussbaum, M. C. (2009). *Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership*. Harvard University Press.
- Nussbaum, M. C. (2011). Perfectionist Liberalism and Political Liberalism. *Philosophy & Public Affairs*, 39 (1), 3-45.
- Rachels, J. (2021). *Problems from Philosophy*. McGraw-Hill Education.
- Ramadhani, D. P., Rachmawati, I., Dudija, N., Ayuningtias, H. G., Gunawan, A. A., & Dennyra, D. S. (2023). *Acceleration of Digital Innovation & Technology towards Society 5.0: Proceedings of the International Conference on Sustainable Collaboration in Business, Information and Innovation (SCBTII 2021), Bandung, Indonesia, 28 July 2021*. CRC Press.
- Sudarno, N. A. (2022). *Apakah Indonesia telah Siap Menyongsong Era Society 5.0?* <https://bandungbergerak.id/article/detail/2017/apakah-indonesia-telah-siap-menyongsong-era-society-5-0>
- Yasa¹, A., Suswanta², Rafi³, M., Rahmanto⁴, F., Setiawan⁵, D., & Fadhlurrohman, M. I. (2021). Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Era Society 5.0 di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20 (01), 27-42.
- Zamrodah, Y. (2016). *Pendidikan Politik* (Vol. 15, Issue 2).